

ABSTRAK

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Adapun mengenai anak-anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal) pertanggungjawabannya telah diatur secara khusus dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terlepas dari obyek pelaku tindak pidana orang dewasa maupun anak-anak, mengenai pertanggungjawaban pidana yang ditekankan adalah tentang dipidananya pelaku dengan berdasarkan asas "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*"

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ? (2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan sumber data sekunder. Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak tersebut tidak diperlakukan sebagai pelaku melainkan diperlakukan sebagai korban sehingga harus diberikan pembinaan. Proses penyidikan terhadap perkara anak yaitu anak yang melakukan tindak pidana mengacu kepada ketentuan dalam KUHAP, dan mengacu kepada ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang merupakan hukum acara bagi penyidikan anak (2) Hambatan-hambatan dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang antara lain : hambatan sarana dan prasarana perlu adanya ruang tahanan khusus anak, dan penambahan personel Unit PPA, hambatan psikologi terangka anak oleh karena itu perlunya pendampingan dalam bantuan hukum, hambatan masyarakat yang malu atau enggan melaporkan perilaku tersangka atau saksi korban, oleh karena itu perlunya sosialisasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata Kunci : Penyidikan, tindak pidana anak

Abstract

In many ways the guiding and such protection, faced with the problems and challenges in society and sometimes is found deviant behavior among children, even more than that, there are also children who for one reason or another do not have the opportunity to gain the attention of physical, mental, and social because of the state of inadequate self is then either intentionally or unintentionally often children do the actions or behavior that could harm himself or society. As for children who commit criminal offenses (brat) accountability has been specifically regulated by Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System Child. Apart from the criminal object of adults and children alike, regarding criminal liability in the emphasis is on the offender dipidananya based on the principle "not be convicted if there is no fault"

The problem in this study were (1) How is the interrogation of minors who committed the crime of theft in the Territory of the City Police Semarang? (2) any barriers faced in the process of investigation of the criminal acts of theft committed by minors in the Territory of the City Police Semarang?

The method of research used socio-juridical approach. Specifications of this writing is descriptive, with a secondary data source. The data obtained in this study then analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion it can be concluded that (1) The process of investigation of the minors who commit the crime of theft in the Territory of the City Police in Semarang are in accordance with the legislation in force, namely Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. These children are not treated as offenders but rather treated as victims and should be given guidance. The process of investigation on the case of children, children who commit criminal acts referring to the provision in the Criminal Code, and subject to the provisions of Law No. 11 In 2012 the procedural law for the prosecution of children (2) Obstacles encountered in the interrogation of minors who committed the crime of theft in the Regional Police Large City Semarang include: barriers infrastructures need for special detention room Child and the addition of PPA Unit personnel, terangka psychological barrier of children therefore need assistance in legal aid, community barriers are embarrassed or reluctant to report the behavior of suspects or witnesses the victim, hence the need for socialization of law No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System. ,

Keywords: Investigation, the crime of child